



Turbulensi Anggaran Memoderasi Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan SIPKD terhadap Akuntabilitas Kinerja

Mutia Tsalitsa Alawia^{1)*}

E-mail Korespondensi : mutia.tsalitsa@polinema.ac.id

Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia¹⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 03/10/2025

Diterima: 21/10/2025

Dipublikasikan: 31/10/2025

Akreditasi oleh

Kemenristekdikti

No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran variabel moderasi turbulensi anggaran pada hubungan antara karakteristik tujuan anggaran yang diprosikan dengan partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran dan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 52 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan 156 sampel pada Pemerintah Kabupaten Blitar. Metode pengambilan data primer melalui penyebaran kuesioner yang diolah dengan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran yang diprosikan dalam partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Blitar, sedangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Variabel moderasi turbulensi anggaran mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh hubungan umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Variabel moderasi turbulensi anggaran tidak memberikan pengaruh pada hubungan partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan dan pengelolaan tujuan anggaran menjadikan faktor penting dalam mendorong terciptanya kinerja instansi yang akuntabel. Selain itu juga harus disertai dengan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Kata Kunci :

akuntabilitas kinerja; karakteristik tujuan anggaran; turbulensi anggaran

Abstract

This study aims to analyze the moderating role of budget turbulence on the relationship between budget goal characteristics proxied by budget participation, budget goal clarity, budget feedback, and budget evaluation and the regional financial management information system (SIPKD) on institutional performance accountability. The population of this study consists of 52 Regional Government Organizations (OPDs) with 156 samples from the Blitar Regency Government. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using SmartPLS 3.0. The results show that the budget goal characteristics variables, proxied by budget participation, budget goal clarity, budget feedback, and budget evaluation, have a positive effect on the performance accountability of the Blitar Regency Government institutions. Meanwhile, the regional financial management information system (SIPKD) has no effect on institutional performance accountability. The moderating variable of budget turbulence strengthens the relationship between budget feedback and budget evaluation with institutional performance accountability. However, budget turbulence does not moderate the relationship between budget participation, budget goal clarity, and the SIPKD variable. Therefore, proper planning and management of budget goals play an essential role in promoting accountable institutional performance. Furthermore, effective evaluation and feedback mechanisms are also required to enhance institutional performance accountability.

Keyword:

budgetary goal characteristics; budget turbulence; performance accountability



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja merupakan ukuran kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang berorientasi pada publik. Akuntabilitas pengukuran kinerja akan memberikan informasi digunakan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penentuan berhasil tidaknya suatu organisasi harus diukur dan indikator pengukurannya tidak hanya berdasarkan masukan tetapi juga manfaatnya untuk publik. Publik berhak mengetahui aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah (Raharja, E., Baga, 2018). Sistem pengukuran kinerja pemerintah diatur dalam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, n.d.) yang menyatakan bahwa dalam mengukur akuntabilitas kinerja organisasi akan memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan alat implementasi akuntabilitas kinerja yang akan dinilai secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh mendapatkan predikat baik oleh Kemenpan RB atas dasar penilaian bahwa dinilai mampu dan memadai dalam melaksanakan SAKIP. Akan tetapi nilai baik tersebut masih fluktuatif dari tahun ke tahun (data.blitarkab.go.id, n.d.) Nilai SAKIP yang masih fluktuatif tersebut akhirnya berkaitan erat dengan

penyerapan anggaran yang juga bergejolak sehingga akan berdampak langsung pada akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Blitar. Penyerapan anggaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan menghilangkan manfaat belanja (pengeluaran). Berdasarkan hasil penyerapan anggaran pada Monitoring Realisasi Anggaran tahun 2021 sebesar 88,85%, tahun 2022 sebesar 86,96%, tahun 2023 sebesar 91,31% dan tahun 2024 88,18% (emonevblitarkab.go.id). Kebijakan yang ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.

Pentingnya fungsi anggaran dalam organisasi untuk penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi perlu dilakukan, sehingga dapat disesuaikan dengan tujuannya hingga masyarakat mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut. Selain itu, organisasi pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk sistem informasi keuangannya. Penggunaan sistem informasi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah dengan membantu dalam melaksanakan pekerjaannya secara cepat, tepat waktu, dan akurat. Sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat memberikan prospek khususnya kesesuaian sistem informasi kinerja keuangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Kardina et al., 2024)

Penelitian ini pengembangan dari (Sulastiningsih & Alboneh, 2020) yang menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Pengembangan ini didasarkan pada hasil penelitian (Sulastiningsih & Alboneh, 2020) yang belum konsisten pada variabel kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, peneliti menambahkan variabel bebas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan penelitian (Davis, 1989) yang menjelaskan faktor dalam penerapan sistem informasi. Sejalan dengan hal tersebut penelitian (Afrina, 2015) dengan hasil penelitian dengan penerapan sistem informasi mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, sedangkan penelitian (Rodhiyah & Sapari, 2019) menunjukkan hasil sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi motivasi peneliti untuk meneliti. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel moderasi turbulensi anggaran yang berdasarkan penelitian (Herianti, 2019) yang menyarankan untuk mengembangkan proksi variabel turbulensi anggaran pada pemerintah daerah untuk meningkatkan literatur dalam kajian akuntansi sektor publik. Sehingga penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja yang dimoderasi turbulensi anggaran.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kontingensi (*Contingency Theory*)

Pendekatan teori kontingensi didasarkan pada pernyataan tidak terdapat bentuk sistem yang secara universal selalu tepat untuk diterapkan pada semua organisasi dalam setiap kondisi. Akan tetapi secara keseluruhan tergantung pada faktor situasional yang ada (Otley, 1980). Prinsip penting dari teori ini adalah organisasi harus secara tepat menyatukan strategi dan struktur jika ingin meningkatkan kinerjanya (Miller, 1988)

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan didasarkan bahwa tujuan seseorang yang dengan sadar mempengaruhi apa yang ingin dicapai (Latham, 2004). Teori penetapan tujuan menggambarkan orang-orang dengan tujuan spesifik dan menantang akan memiliki kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang tidak jelas. Sehingga, teori penetapan tujuan diasumsikan ada hubungan langsung antara tujuan dan kinerja yang spesifik yang terukur (Verbeeten, 2008).

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology acceptance model menggambarkan suatu sistem informasi bisa dimanfaatkan dilihat dari bagaimana pengguna mau menerima dan memanfaatkannya. Variabel yang terkait antara lain kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1989)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan. Kewajiban tersebut (para pemangku kepentingan) dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (Perpres No 29 tahun 2014 tentang SAKIP)

Karakteristik Tujuan Anggaran (*Budgetary Goal Characteristics*)

Karakteristik tujuan anggaran berkaitan dengan alat dan tindakan untuk menentukan kemajuan dalam mencapai tujuan anggaran dan tujuan kinerja. Instrumen penelitian ini menggunakan dimensi penelitian (Kenis, 1979) yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, n.d.) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya. Sehingga bisa menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan akuntabilitas. Pengukuran indikatornya dengan kemudahan dan kemanfaatannya (Aswad & Adriyani, 2024)

Turbulensi Anggaran

Turbulensi dijelaskan sebagai sesuatu yang memiliki tingkat perubahan antar periode yang tinggi yang menciptakan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Turbulensi anggaran berarti perubahan secara substansial terkait sumber daya dan anggaran dari satu tahun sekarang dan satu tahun ke depan. Turbulensi mengharuskan instansi pemerintah untuk menghadapi tantangan tata kelola dalam berbagai situasi yang bisa berubah secara tidak terduga (Ansell & Trondal, 2018).

Menurut (Herianti, 2019) turbulensi bisa digambarkan melalui perkembangan lingkungan ekonomi mikro dan makro, perubahan kebijakan pemerintah, prediksi pendapatan serta keakuratan perhitungan pengeluaran.

Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Partisipasi pada penyusunan anggaran akan menciptakan komunikasi antara pimpinan atas dan bawah terkait dengan tanggung jawabnya, dan berpengaruh terhadap target anggaran yang bisa mendapatkan penghargaan atas tercapainya anggaran (Brownell, 1982). Berdasarkan (Susanti., Husaini., 2017) partisipasi anggaran berkorelasi positif dengan akuntabilitas kinerja organisasi. Tapi (Soeksni et al., 2020) gagal mendukung temuan tersebut. Elemen penting dari dinamisme lingkungan dalam organisasi adalah turbulensi, yang didefinisikan sebagai perubahan yang tidak dapat diprediksi (Ansell & Trondal, 2018). Teori kontingensi terkait dengan desain kontrol yang bersifat kontingen dimana kontrol tersebut akan beroperasi. Moores & Duncan (1989) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi merupakan fungsi kesesuaian antara struktur organisasi dan lingkungan dimana organisasi beroperasi. Efek faktor kontingensi pada kinerja mungkin dimoderasi oleh turbulensi lingkungan organisasi tersebut (Harash *et al.*, 2014). Kepercayaan antara individu (aparatur) dibangun dalam menghadapi turbulensi dan ketidakpastian yang diwujudkan dengan melalui pemberdayaan individu (aparatur) (Psychogios *et al.*, 2015). Pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan atau partisipasi mereka pada penganggaran organisasi. Hal ini dianggap mendukung bahwa kondisi turbulensi anggaran bisa meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, akan tetapi belum diperkuat dengan penelitian terdahulu yang serupa. Maka hipotesisnya adalah

H_{1a}: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

H_{1b}: Turbulensi anggaran memperkuat pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Penetapan kejelasan tujuan anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan merusak perencanaan. Kejelasan tujuan anggaran harus jelas, spesifik dan mudah dipahami oleh karyawan, sehingga dapat menentukan tujuan organisasi. Kejelasan tujuan anggaran penting dalam pemerintahan karena digunakan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya kinerja untuk mencapai akuntabilitas kinerja sebagai organisasi yang berorientasi pada publik. Berdasarkan (Kaltsum, U & Rohman, 2014) kejelasan sasaran anggaran berkorelasi dengan akuntabilitas kinerja organisasi, namun (Soeksin et al., 2020) menunjukkan kebalikannya.

Perencanaan strategis anggaran lebih efektif bila menunjukkan yang stabil, pasti atau tidak bermasalah. Sasaran organisasi dapat berubah ketika menghadapi turbulensi, sehingga solusinya adalah dengan mengoptimalkan perencanaan sebelumnya. Keputusan ketidakpastian akan menyebabkan kondisi yang tidak stabil, namun hal ini belum diperkuat dengan penelitian serupa karena kebaruan dalam penelitian ini dengan variabel turbulensi. Teori kontingensi menjelaskan keselarasan antara kejelasan (ketegasan) anggaran dengan faktor-faktor kontingensi seperti strategi bisnis untuk menerapkan anggaran yang tegas maupun longgar yang tergantung pada organisasi tersebut (Merchant & Van der Stede, 2003). Apabila keselarasan antara kejelasan anggaran dan strategi bisnis berjalan beriringan maka akan mampu mencapai target kinerja organisasi yang berkaitan secara langsung dengan bentuk akuntabilitas instansi. Oleh karena itu, jika tidak ada kejelasan sasarannya dalam pergolakan kondisi anggaran akan menurunkan akuntabilitas kinerja organisasi. Maka, hipotesisnya adalah

H_{2a}: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

H_{2b}: Turbulensi anggaran memperlemah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

Pengaruh Umpan Balik Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Pencapaian tujuan organisasi menggambarkan performa yang baik sehingga individu mengharapkan umpan balik untuk memotivasi peningkatan performanya. Tanggapan umpan balik akan positif atau negatif, umpan balik dapat menimbulkan ketidakpuasan karena merupakan pengakuan atas prestasi dan kemampuan kerja mereka, (Nurlelahayati et al., 2017). Menurut Wardani & Sudaryati (2015), umpan balik tidak berkorelasi dengan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun Setiyadi *et al.*, (2018) menunjukkan hal sebaliknya.

Pemberdayaan individu memutuskan untuk berbagi masalah yang lebih luas sehingga dapat merespon dan meningkatkan komitmen mereka terhadap tujuan organisasi. Pentingnya pemberdayaan individu jika suatu organisasi menghadapi gejolak anggaran karena individu membutuhkan kebebasan untuk mencari solusi. *Goal setting theory* atau teori penetapan tujuan menjelaskan bahwa penetapan tujuan ditetapkan diawal agar individu (pelaku) berkeinginan dan berpedoman selama proses untuk mencapai tujuan organisasi tersebut (Locke, 1986). Tercapainya tujuan organisasi menunjukkan kinerja pelaku yang baik, sehingga pelaku mengharapkan umpan balik (*feedback*) untuk memotivasi peningkatan kinerja. Maka hipotesisnya adalah

H_{3a}: Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

H_{3b}: Turbulensi anggaran memperkuat pengaruh umpan balik anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

Pengaruh Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Proses anggaran merupakan peluang yang baik untuk mengevaluasi pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya secara ekonomis, efektif, dan efisien. (Syuliswati & Asdani, 2017a) menyatakan bahwa

evaluasi anggaran dapat memberikan informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan dan program dalam organisasi. Evaluasi menemukan adanya penyimpangan anggaran, sehingga harus diidentifikasi dan diperbaiki untuk memberikan performa yang baik yang berdampak pada akuntabilitas kinerja organisasi. Berdasarkan (Syuliswati & Asdani, 2017b) serta (Winara, P & Putri, 2019a, 2019b), evaluasi anggaran berhubungan dengan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun demikian, Utami *et al.* (2017) menunjukkan kebalikannya.

Lingkungan organisasi terkadang mengalami perubahan yang menyebabkan turbulensi baik lingkungan maupun anggaran. Gejolak anggaran menyebabkan ketidakpastian dan memerlukan pengendalian, sehingga diperlukan evaluasi program atau kegiatan. Organisasi akan mampu menghadapi turbulensi dengan pengembangan individu baik bakat dan kemampuan serta pengalaman melalui evaluasi (Nur Syahiroh *et al.*, 2024). Pendekatan teori kontingensi menggambarkan bahwa terdapat kemungkinan variabel penentu lainnya yang saling berinteraksi, yang selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi organisasi. Kesesuaian (*fit*) dalam pendekatan kontingensi menunjukkan tingkat kesesuaian faktor situasional dalam organisasi (Suryani, 2019). Maka hipotesisnya adalah

H_{4a}: Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

H_{4b}: Turbulensi anggaran memperkuat pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Pencapaian sistem tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dapat mengolah input dan output dengan baik, tetapi juga keinginan *user* untuk menerima dan memanfaatkannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sangat penting menggunakan sistem informasi sebagai penghubung performa dan hasilnya diakui untuk analisis organisasi (Winara, P & Putri, 2019a). Sistem informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk mengukur performa yang baik terutama dalam hal akuntabilitas sebagai tanggung jawab kepada publik (Abdullah, 2015)

Masalah organisasi adalah tingkat perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi yang dapat mempengaruhi perencanaan dan sistem informasi. Perencanaan dengan sistem informasi (teknologi) diasumsikan dapat membantu organisasi dalam menghadapi turbulensi (Risdiyanto, 2017) Dengan demikian, tujuan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat membantu akuntabilitas kinerja organisasi menghadapi gejolak anggaran. Teori kontingensi menjelaskan bahwa organisasi memerlukan desain sistem informasi sesuai dengan lingkungan dimana organisasi tersebut berada. Permasalahan yang sering terjadi yaitu tingkat perubahan lingkungan yang sering tidak bisa diprediksi dapat mempengaruhi perencanaan bisnis dan sistem informasi instansi. Perencanaan dalam memanfaatkan sistem informasi diasumsikan dapat membantu organisasi dalam menghadapi turbulensi (Salmela *et al.*, 2000). Maka hipotesisnya adalah

H_{5a}: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

H_{5b}: Turbulensi anggaran memperkuat pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian metode kuantitatif dengan mengembangkan angket dengan pengujian model dan hipotesis. Penelitian ini menggunakan variabel independen karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Proksi untuk karakteristik tujuan anggaran berisi partisipasi, kejelasan tujuan, umpan balik, evaluasi anggaran serta SIPKD. Variabel terikatnya akuntabilitas kinerja instansi dengan dimoderasi turbulensi anggaran. Populasi penelitian adalah 52 OPD dengan 156 sampel di Kabupaten Blitar. Teknik *sampling* menggunakan nonprobabilitas dengan *convenience sampling* dengan kriteria kepala subbagian pengguna anggaran, kepala perencanaan program, dan kepala subbagian keuangan. Penyebaran kuesioner secara

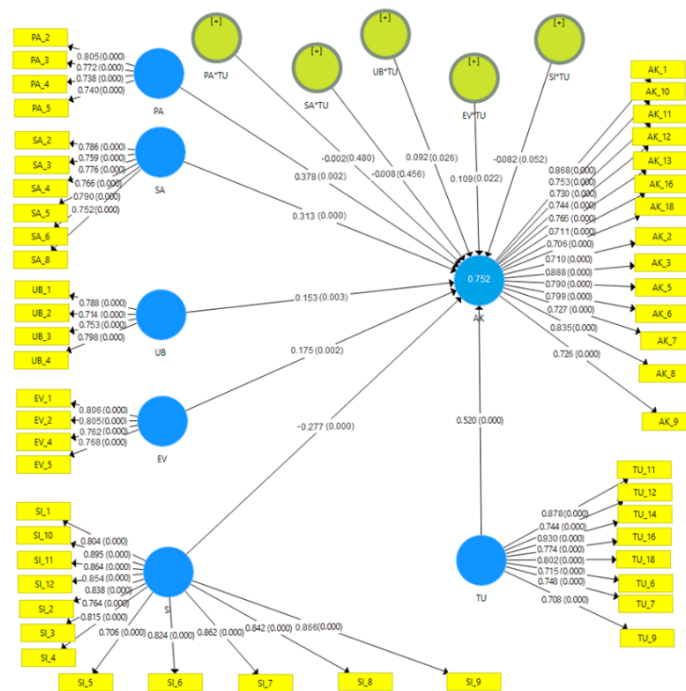
langsung kepada responden dan dianalisis dengan *Partial Least Square* (PLS) berdasarkan Structural Equation Modeling (SEM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi model penelitian dengan pengujian *outer model* dan *inner model*. Uji *outer model* dilakukan untuk mengetahui nilai validitas konvergen dan diskriminan serta nilai reliabilitas instrumen pada penelitian. Pengukurannya dengan nilai AVE, *communality*, *outer loading*, *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Uji *inner model* evaluasinya dilakukan dengan melihat nilai R^2 untuk menentukan kekuatan dari suatu model penelitian.

Uji Validitas Konvergen

Hasil uji relevansi *outer loading factor* pada indikator penelitian pada konstruk partisipasi anggaran, kejelasan sasaran, umpan balik, dan evaluasi anggaran, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kinerja instansi dan turbulensi anggaran memiliki nilai $> 0,7$, dan semua konstruk memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Total dari 71 indikator yang ada, telah dihapus sebanyak 19 indikator yang tidak memenuhi syarat dan tersisa sebanyak 52 indikator yang memenuhi syarat.



Sumber : data primer diolah (2025)

Gambar 1. Diagram Jalur

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

No	Konstruk	Indikator	Outer Loading Factor	AVE	Keterangan
1.	Partisipasi Penyusunan Anggaran (PA)	PA2	0.805	0.584	Valid
		PA3	0.771		Valid
		PA4	0.738		Valid
		PA5	0.740		Valid
2.	Kejelasan Sasaran Anggaran (SA)	SA2	0.786	0.538	Valid
		SA3	0.759		Valid
		SA4	0.776		Valid

No	Konstruk	Indikator	Outer Loading Factor	AVE	Keterangan
3.	Umpan Balik Anggaran (UB)	SA5	0.766	0.583	Valid
		SA6	0.790		Valid
		SA8	0.752		Valid
		UB1	0.788		Valid
		UB2	0.714		Valid
		UB3	0.753		Valid
		UB4	0.798		Valid
4.	Evaluasi Anggaran (EV)	EV1	0.806	0.544	Valid
		EV2	0.805		Valid
		EV4	0.762		Valid
		EV5	0.768		Valid
5.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SI)	SI1	0.804	0.657	Valid
		SI2	0.838		Valid
		SI3	0.764		Valid
		SI4	0.815		Valid
		SI5	0.706		Valid
		SI6	0.824		Valid
		SI7	0.862		Valid
		SI8	0.842		Valid
		SI9	0.866		Valid
		SI10	0.895		Valid
		SI11	0.864		Valid
		SI12	0.854		Valid
6.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AK)	AK1	0.868	0.518	Valid
		AK2	0.710		Valid
		AK3	0.888		Valid
		AK5	0.790		Valid
		AK6	0.799		Valid
		AK7	0.727		Valid
		AK8	0.835		Valid
		AK9	0.726		Valid
		AK10	0.753		Valid
		AK11	0.730		Valid
		AK12	0.744		Valid
		AK13	0.765		Valid
		AK16	0.711		Valid
		AK18	0.706		Valid
7.	Turbulensi Anggaran (TU)	TU6	0.715	0.511	Valid
		TU7	0.748		Valid
		TU9	0.708		Valid
		TU11	0.878		Valid
		TU12	0.744		Valid
		TU14	0.930		Valid
		TU16	0.774		Valid
		TU18	0.802		Valid

Sumber : data primer diolah (2025)

Uji Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan akan dinilai berdasarkan *cross loading* dengan *rule of thumb* harus lebih besar dari 0,7 atau dengan membandingkan nilai akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan

	AK	EV	PA	SA	SI	TU	UB
AK	0.820	0.613	0.620	0.593	0.387	0.680	0.613
EV	0.613	0.738	0.704	0.663	0.555	0.576	0.520
PA	0.620	0.704	0.764	0.670	0.429	0.555	0.538
SA	0.593	0.663	0.670	0.733	0.405	0.521	0.485
SI	0.387	0.555	0.429	0.405	0.811	0.338	0.811
TU	0.680	0.576	0.555	0.521	0.338	0.802	0.484
UB	0.613	0.520	0.538	0.485	0.811	0.484	0.764

Sumber : data primer diolah (2025)

Uji Reliabilitas

Hasil uji *Cronbach's Alpha* atau *composite reliability* pada variabel laten akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan turbulensi anggaran menunjukkan nilai diatas 0,7 maka dapat dijelaskan bahwa hasilnya secara keseluruhan memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Chronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Kinerja	0,937	0,928	Reliabel
Partisipasi Anggaran	0,849	0,765	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,874	0,826	Reliabel
Umpan Balik Anggaran	0,848	0,787	Reliabel
Evaluasi Anggaran	0,824	0,713	Reliabel
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,958	0,951	Reliabel
Turbulensi Anggaran	0,893	0,865	Reliabel

Sumber: data primer diolah (2025)

Uji R Square

Nilai R^2 sebesar 0,752 menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel partisipasi penyusunan anggaran (X_1), kejelasan sasaran anggaran (X_2), umpan balik anggaran (X_3), evaluasi anggaran (X_4), sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X_5), dan turbulensi anggaran (Z) sebesar 75,2% dan sisanya sebesar 24,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Tabel 4. Nilai R Square

Pengaruh	R^2
$X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Z \rightarrow Y$	0.752

Sumber: data primer diolah (2025)

$$R^2_m = 1 - P^2_{e1}P^2_{e2}...P^2_{ep}$$

Dimana

$$P^2_{e1} = 1 - R^2_1$$

Nilai R^2 adalah R square untuk persamaan ini yaitu 0,752

$$P^2_{e1} = 1 - 0,752 = 0,248$$

Sehingga diperoleh total koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - 0,752 = 0,248 \text{ atau } 24,8\%$$

Uji Q Square

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai GoF masuk dalam kriteria besar karena hasilnya lebih diatas 0.38. sehingga model struktural telah memenuhi GoF atau model dapat diterima.

$$GoF = \sqrt{Rata - rata AVE \times R^2}$$

Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$GoF = \sqrt{0,5621 \times 0,752} = 0.65$$

Uji Hipotesis

Pengujian ini melalui uji signifikansi koefisien jalur dari *partial least square* (PLS), koefisien jalur menunjukkan besarnya pengaruh dari satu variabel eksogen terhadap variabel endogennya. Jika nilainya menunjukkan signifikan maka dinyatakan variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Koefisien Path	P-Value	Keterangan
H_{1a}	Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja	0,378	0,002	Diterima
H_{1b}	Pada kondisi turbulensi anggaran pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja semakin meningkat	-0,002	0,480	Ditolak
H_{2a}	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas	0,313	0,000	Diterima
H_{2b}	Pada kondisi turbulensi anggaran pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja semakin menurun	-0,008	0,456	Ditolak
H_{3a}	Umpan balik anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja	0,153	0,003	Diterima
H_{3b}	Pada kondisi turbulensi anggaran pengaruh positif umpan balik anggaran terhadap akuntabilitas kinerja semakin meningkat	0,092	0,026	Diterima
H_{4a}	Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja	0,175	0,002	Diterima
H_{4b}	Pada kondisi turbulensi anggaran pengaruh positif evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja semakin meningkat	0,109	0,022	Diterima
H_{5a}	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja	-0,277	0,000	Ditolak
H_{5b}	Pada kondisi turbulensi anggaran pengaruh positif SIPKD terhadap akuntabilitas kinerja semakin meningkat	-0,082	0,052	Ditolak

Sumber: data primer diolah (2025)

Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *one tailed test* melalui proses *bootstrapping* dengan melihat nilai *p-value* kurang dari nilai α yaitu 0.05, hal ini berarti hipotesis diterima. Tabel 5 menjelaskan hasil pengujian koefisien path. Pada H_{1a}, H_{2a}, H_{3a}, H_{4a} memiliki nilai *p-value* < 0.05 sehingga hipotesis diterima. Variabel karakteristik tujuan anggaran dengan proksi partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini mendukung *goal setting theory* bahwa dengan ditetapkannya goal (tujuan) diawal agar individu (pelaku) bersemangat dan berpedoman selama proses mencapai tujuan organisasi (Locke, 1986). Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Kaltsum, U & Rohman, 2014; Soeksin et al., 2020; Winara, P & Putri, 2019b). Oleh karena itu, dengan penetapan karakteristik tujuan anggaran maka akan membantu dalam pencapaian tujuan instansi, sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi yang berperan sebagai organisasi sektor publik. Sehingga dapat disimpulkan apabila penerapan karakteristik tujuan anggaran baik, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Berdasarkan tabel 5, pada H_{5a} menunjukkan nilai *p-value* $0.000 < 0.05$, tetapi nilai koefisien path - 0.277 hal ini berarti hipotesis ditolak. Sehingga, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini dijelaskan dalam *Theory Acceptance Model* (TAM) yang menggambarkan terdapat faktor yang yang mempengaruhi individu untuk penerimaan suatu sistem. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Sapulette & Limba, 2022). Dengan demikian, penerapan SIPKD belum menjadi salah satu variabel yang mewakili dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD pemerintah Kabupaten Blitar.

Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Berdasarkan tabel 5, pada H_{1b} yaitu partisipasi anggaran dan H_{2b} yaitu kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai *p-value* > 0.05 yang berarti hipotesis ditolak. Sehingga, turbulensi anggaran tidak mampu memoderasi pada hubungan partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Psychogios, 2015) menjelaskan dimungkinkan terjadi karena kurangnya tingkat kepercayaan antara individu (aparatur) yang seharusnya dibangun dalam menghadapi turbulensi, meskipun pengambilan keputusan bersifat flexibel dalam kondisi turbulensi. Dalam H_{3b} yaitu umpan balik anggaran dan H_{4b} yaitu evaluasi anggaran memiliki nilai *p-value* < 0.05 yang berarti hipotesis diterima. Hal ini turbulensi anggaran mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pada umpan balik dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini didukung oleh penelitian (Prouska et al., 2016) yang menjelaskan bahwa dengan adanya umpan balik dan pengendalian (evaluasi) pada kondisi turbulensi bisa memperkuat akuntabilitas kinerja instansinya.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi dengan Moderasi Turbulensi Anggaran

Berdasarkan pada tabel 5, hipotesis H_{5b} memiliki nilai *p-value* > 0.05 sehingga hipotesis ditolak. Sehingga, kondisi turbulensi anggaran tidak mampu memoderasi pada hubungan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Hal ini didukung oleh penelitian (Salmela et al., 2000). Dengan demikian, pada kondisi turbulensi maupun tidak, penerapan SIPKD belum memberikan pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian menyatakan partisipasi, kejelasan sasaran, umpan balik, evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi, sedangkan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah (SIPKD) tidak berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan pengelolaan tujuan anggaran menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kinerja instansi yang akuntabel. Namun demikian, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Variabel moderasi turbulensi anggaran mampu memperkuat pengaruh pada hubungan umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Selain itu, variabel turbulensi anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hasil ini menekankan pentingnya fokus pada penyusunan tujuan anggaran yang jelas, disertai mekanisme evaluasi dan umpan balik yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, serta perlunya perhatian terhadap kondisi turbulensi anggaran yang dapat memperkuat maupun melemahkan pengaruh karakteristik tujuan anggaran tertentu.

Saran untuk penelitian berikutnya terkait dengan pernyataan kuesioner disusun dengan pernyataan positif dan negatif agar responden membaca dan mengisi dengan hati agar menghindari konsistensi jawaban responden. Selain itu, saran untuk penelitian berikutnya terkait dengan perbedaan karakteristik setiap OPD pada pemerintah daerah adalah peneliti lebih berhati-hati dalam penerapan hasil penelitian dengan melihat perbedaan karakteristik setiap OPD pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2015). Local Government Accounting System (SAPD) on Local Government Accountability Performance (AKIPD) at the Regional Secretariat of Buton. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(1), 36–42. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/bisnisekonomi/article/view/131>
- Afrina, D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15.
- Ansell, C., & Trondal, J. (2018). Governing Turbulence: An Organizational- Institutional Agenda. *Perspectives on Public Management and Governance*, 1(1), 43–57. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvx013>
- Brownell, P. (1982). The Role of Accounting Data in Performance Evaluation , Budgetary Participation , and Organizational Effectiveness. *Journal of Accounting Research*, 20(1), 12–27. <https://doi.org/doi.org/10.2307/2490760>
data.blitarkab.go.id. (n.d.).
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Herianti, E. (2019). Budget Turbulence and Budget Deviation: Do Local Government Have the Ability To Reduce Them? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 1–20. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.285>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kaltsum, U & Rohman, A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Joournal of Accounting*, 3(1), 215–228.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Eka Putri, N.,(2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia. In *Jurnal Professional* (Vol. 11, Issue 2).
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, 54(4), 707–721. <http://www.jstor.org/stable/245627>
- Latham, G. P. (2004). Goal-Setting. *Academy of Management Executive*, 18(4), 126–129.

- Latham, G. P., Brcic, J., & Steinhauer, A. (2016). Toward an Integration of Goal Setting Theory and the Automaticity Model. *Applied Psychology*, 66(1), 25–48. <https://doi.org/10.1111/apps.12087>
- Miller, D. (1988). Relating Porter'S Business Strategies To Environment and Structure: Analysis and Performance Implications. *Academy of Management Journal*, 31(2), 280–308. <https://doi.org/10.2307/256549>
- Nur Syahiroh, Syira Alegra Putri Fatekhah, Jovan Dwi Prasetyo, & Mu'allimin Mu'allimin. (2024). Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Bakat dan Ketahanan Dalam Organisasi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 79–92. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.434>
- Nurlelahayati, N., Indriani, M., & Syam BZ, F. (2017). Pengaruh Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 134–150. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8227>
- Otley, D. T. (1980). The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis*. In *Organizations and Society* (Vol. 5, Issue 4). Pergamon Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Prouska, Psychogios & Rexhepi. (2016). Rewarding Employees in Turbulent Economis for Improved Organisational Performance. *Personal Review*. 45, 1259-1280.
- Raharja, E., Baga, L. & F. (2018). Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor (*Improvement Strategy of the Performance Accountability of the Bogor City Government*). *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 60–75.
- Risdwiyanto, A. (2017). High-Performance Organization untuk Menghadapi Turbulensi Lingkungan Bisnis. In *Jurnal Maksipreneur: Vol. VII* (Issue 1).
- Rodhiyah, N. I., & Sapari. (2019). Pengaruh Sistem Informasi, Budaya, Komitmen dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1–21.
- Salmela, Lederer & Reponen (2000). Information systems planning in a turbulent environment. *European Journal of Information Systems*. Vol 9: 3-15.
- Sapulette & Limba. (2022). Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 4(8), 3730-3734.
- Soeksin, S. D., Friandi, S. Z., & Rifai, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan. *JAMAN*, 1(1), 40–47.
- Sulastiningsih, S., & Alboneh, Z. (2020a). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Manajemen*, 7(2), 113–128. <https://doi.org/doi.org/10.32477/jrm.v7i2.203>
- Sulastiningsih, S., & Alboneh, Z. (2020b). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Manajemen*, 7(2), 113–128. <https://doi.org/doi.org/10.32477/jrm.v7i2.203>
- Susanti., Husaini., & C. (2017). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Kota Bengkulu). *Management Insight*, 12(2), 77–88.
- Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017a). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 24(1), 1–17. <http://journal.stie-mce.ac.id/index.php/jabm/article/view/79%3E>.
- Syuliswati, A., & Asdani, A. (2017b). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Politeknik Negeri Malang. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 24(1), 1–17.

- Verbeeten, F. H. M. (2008). *Performance Management Practices in Public Sector Organizations. Performance Management Practices in Public Sector Organizations Impact on Performance*, 21(3), 427–454. <https://doi.org/10.1108/09513570810863996>
- Winara, P & Putri, R. (2019a). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi dan Tunjangan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Moderasi. 2(2), 186–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.46880/jsika.v2i2.33>
- Winara, P & Putri, R. (2019b). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi dan Tunjangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Sistem Informasi sebagai Variabel Moderasi. 2(2), 186–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.46880/jsika.v2i2.33>
- Yulianti, R., Hardi, & Rusli. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). In *JOM FEKON* (Vol. 1, Issue 2).